



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593

Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YANG DITETAPKAN TAHUN 2024**

No.	URAIAN PERDA
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas
2	Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum
	KUMULATIF TERBUKA
3	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023
4	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024
5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025

Padang, Januari 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT

Drs. Maifrizon, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593

Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG DISETUJUI DPRD TAHUN 2024

No.	URAIAN PERDA
	Ranperda Usulan Baru
1	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha
2	Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2026-2035
3	Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Jamkrida Sumatera Barat menjadi Jamkrida Sumatera Barat (Persero)
6	Ranperda tentang Pengelolaan Mangrove
7	Ranperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi
8	Ranperda tentang Pengelolaan Pesantren
9	Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat
	Ranperda Luncuran Propemperda tahun 2023
1	Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat
2	Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas
3.	Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
4	Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum
5.	Pengelolaan Penyiaran Daerah
6	Mutu Pelayan Kesehatan
	Ranperda Kumulatif Terbuka
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023

2	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025

Padang, Januari 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT

Drs. Maifrizon, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593

Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

PROPEMPERDA TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA
A. Ranperda Usulan Baru		
1.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	
3.	Jasa Konstruksi	
4.	Penyelenggaraan Jalan	
5.	Peubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	
6.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	
B. RANPERDA LUNCURAN 2024		
1	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha.	
2	Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	
3	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	
4	Ranperda tentang Fasilitas dan Penguatan Pesantren.	
5	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di daerah	
6	Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda)	
7	Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	
8	Ranperda tentang Pengelolaan Sampah	

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

NO.	DAFTAR KUMULATIF TERBUKA	JUDUL RANCANGAN PERDA
		1. Ranperda tentang APBD Tahun 2026.
		2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
		3. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024.

Padang, Januari 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT

Drs. Maifrizon, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593

Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 YANG DITINDAKLANJUTI

Dalam tahun 2024 terdapat 15 (lima belas) Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

1	Keputusan DPRD No 4/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial.
2	Keputusan DPRD No 5/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan awal RPJPD Prov Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
3	Keputusan DPRD No 8/SB/Tahun 2024 tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
4	Keputusan DPRD No 8a/SB/Tahun 2024 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Pengelolaan Mangrove menjadi prakarsa.
5	Keputusan DPRD No 9/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Kesepakatan Substansi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.
6	Keputusan DPRD No 10/SB/Tahun 2024 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjadi prakarsa.
7	Keputusan DPRD No 12/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Perda.
8	Keputusan DPRD No 13/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan KUA Tahun 2025.
9	Keputusan DPRD No 14/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan PPAS Tahun 2025.
10	Keputusan DPRD No 15/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan KUA Perubahan Tahun 2024.
16	Keputusan DPRD No 16/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan PPAS Perubahan Tahun 2024.
11	Keputusan DPRD No 17/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran APBD Tahun 2024.

12	Keputusan DPRD No 24/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
13	Keputusan DPRD No 25/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Prov Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14	Keputusan DPRD No 30/SB/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
15	Keputusan DPRD No 31/SB/Tahun 2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang APBD Prov Sumbar Tahun 2025.

Padang, Januari 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT

Drs. Maifrizon, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593

Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Dalam tahun 2024 terdapat 31 (tiga puluh satu) Keputusan-Keputusan DPRD, antara lain :

1	Keputusan DPRD tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Nomor 5/ SB//2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa tugas 2022-2024.
2	Keputusan DPRD tentang Perubahan Keputusan DPRD Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Tahun 2019-2024, masa tugas 2022-2024.
3	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD Prov Sumatera Barat Tahun 2025-2045
4	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial.
5	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan awal RPJPD Prov Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
6	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.
7	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
8	Keputusan DPRD tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
8 A	Keputusan DPRD tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Pengelolaan Mangrove menjadi prakarsa.
9	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Kesepakatan Substansi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.
10	Keputusan DPRD tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjadi prakarsa.

11	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Pansus Pembahasan RPJPD Tahun 2025-2045.
12	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Perda.
13	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan KUA Tahun 2025.
14	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan PPAS Tahun 2025.
15	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan KUA Perubahan Tahun 2024.
16	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan PPAS Perubahan Tahun 2024.
17	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran APBD Tahun 2024.
18	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
19	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Prov Sumbar Masa Jabatan 2024-2029.
20	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Prov Sumbar Masa Jabatan 2024-2029.
21	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Prov Sumbar Masa Jabatan 2024-2029.
22	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Bapemperda DPRD Prov Sumbar Masa Jabatan 2024-2029.
23	Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Prov Sumbar Masa Jabatan 2024-2029.
24	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.
25	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Prov Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26	Keputusan DPRD tentang Tata Beracara DPRD Provinsi Sumbar.
27	Keputusan DPRD tentang Penetapan Panitia Khusus Tata Tertib DPRD.
28	Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029.

29	Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
30	Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
31	Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang APBD Prov Sumbar Tahun 2025.

Padang, Januari 2025
 Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
 SUMATERA BARAT

Drs. Maifrizon, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680513 199512 1 005



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593

Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		Sisa
			Keuangan	%	
4.02.01		127.463.578.147	123.094.148.644	96,57	4.369.429.503
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	696.337.900	665.383.850	95,55	30.954.050
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.120.000	305.171.850	98,09	5.948.150
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	263.070.000	253.015.600	96,18	10.054.400
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.147.900	107.196.400	87,76	14.951.500
4.02.01.1.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	13.295.705.335	12.396.462.361	93,24	899.242.974
4.02.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.712.077.135	10.854.294.161	92,68	857.782.974
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.238.685.300	1.208.993.500	97,6	29.691.800
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusutan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	344.942.900	333.174.700	96,59	11.768.200
4.02.01.1.03	Administrasi barang milik daerah parda perangkat daerah	1.065.592.587	1.054.214.786	98,93	11.377.801
4.02.01.1.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	467.733.492	464.632.911	99,34	3.100.581
4.02.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	552.829.500	544.552.280	98,5	8.277.220
4.02.01.1.03.06	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	45.029.595	45.029.595	100	0
4.02.01.1.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	333.808.000	298.000.000	89,27	35.808.000
4.02.01.1.05.02	Pengadaan pemakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	298.000.000	298.000.000	100	0
4.02.01.1.05.09	Pndidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	35.808.000	0	0	35.808.000
4.02.01.1.06	Administrasi umum perangkat daerah	11.520.493.493	10.644.332.382	92,39	876.161.111
4.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	152.859.280	150.691.600	98,58	2.167.680
4.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	325.604.825	312.830.000	96,08	12.774.825
4.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.543.444.826	2.502.764.100	98,4	40.680.726
4.02.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	1.618.899.512	1.335.305.156	82,48	283.594.356

4.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.217.768.750	987.693.149	81,11	230.075.601
4.02.01.1.06.06	Penyediaan bagan bacan dan peraturan perundang-undangan	768.825.000	720.807.000	93,75	48.018.000
4.02.01.1.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	1.698.520.000	1.501.152.000	88,38	197.368.000
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.383.656.000	2.382.647.277	99,96	1.008.723
4.02.01.1.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	107.234.300	104.593.100	97,54	2.641.200
4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	703.681.000	645.849.000	91,78	57.832.000
4.02.01.1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	19.060.435.403	18.983.265.986	99,6	77.169.417
4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	660.900.000	660.900.000	100	0
4.02.01.1.07.05	Pengadaan mebel	837.056.903	834.898.780	99,74	2.158.123
4.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	995.218.600	995.000.000	99,98	218.600
4.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.200.000	66.384.700	77,92	18.815.300
4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.022.439.900	9.000.235.656	99,75	22.204.244
4.02.01.1.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7.459.620.000	7.425.846.850	99,55	33.773.150
4.02.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	13.980.532.343	13.577.307.493	97,12	403.224.850
4.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	140.430.700	139.245.400	99,16	1.185.300
4.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.858.485.200	2.618.744.203	91,61	239.740.997
4.02.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.079.810.458	2.005.958.111	96,45	73.852.347
4.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8.901.805.985	8.813.359.779	99,01	88.446.206
4.02.01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	23.632.536.249	21.850.888.814	92,46	1.781.647.435
4.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	152.571.000	142.616.524	93,48	9.954.476
4.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	977.843.100	938.147.076	95,94	39.696.024
4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan mebel	333.000.000	314.585.000	94,47	18.415.000
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	109.390.000	76.027.950	69,5	33.362.050
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	16.105.034.039	15.426.957.749	95,79	678.076.290

4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.792.942.110	4.267.376.980	89,03	525.565.130
4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.161.756.000	685.177.535	58,98	476.578.465
4.02.01.1.15	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	43.150.554.441	42.988.774.530	99,63	161.779.911
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	41.263.890.441	41.137.622.530	99,69	126.267.911
4.02.01.1.15.02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	1.831.764.000	1.796.360.000	98,07	35.404.000
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan medical check up DPRD	54.900.000	54.792.000	99,8	108.000
4.02.01.1.16	Layanan administrasi DPRD	727.582.396	635.518.442	87,35	92.063.954
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	95.160.000	94.950.000	99,78	210.000
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	143.400.000	143.376.000	99,98	24.000
4.02.01.1.16.04	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	489.022.396	397.192.442	81,22	91.829.954
4.02.02		91.806.034.698	71.637.121.365	78,03	20.168.913.333
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	23.370.562.700	15.239.721.807	65,21	8.130.840.893
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.206.849.000	653.406.382	54,14	553.442.618
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	6.627.657.200	3.903.289.192	58,89	2.724.368.008
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	339.778.000	276.625.674	81,41	63.152.326
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	421.049.000	204.261.300	48,51	216.787.700
4.02.02.1.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	14.775.229.500	10.202.139.259	69,05	4.573.090.241
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.575.335.700	3.444.617.638	75,29	1.130.718.062
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	880.075.400	835.649.969	94,95	44.425.431
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.017.500	75.446.300	81,99	16.571.200
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1.549.117.900	669.129.262	43,19	879.988.638
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1.197.898.800	1.101.824.478	91,98	96.074.322
4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6.958.300	3.847.000	55,29	3.111.300
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	849.267.800	758.720.629	89,34	90.547.171
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.021.473.900	7.242.225.176	72,27	2.779.248.724
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.764.827.600	1.275.625.500	72,28	489.202.100
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.911.829.600	1.406.953.500	73,59	504.876.100
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.994.321.700	1.362.821.500	68,34	631.500.200

4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.992.757.900	1.427.635.200	71,64	565.122.700
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.645.392.600	1.261.768.700	76,68	383.623.900
4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	151.919.400	29.764.400	19,59	122.155.000
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	63.262.300	4.562.300	7,21	58.700.000
4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	497.162.800	473.094.076	95,16	24.068.724
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.637.019.158	13.991.957.446	89,48	1.645.061.712
4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	1.534.625.798	997.898.180	65,03	536.727.618
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.910.320.400	2.657.388.044	91,31	252.932.356
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.045.475.960	2.034.293.063	99,45	11.182.897
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	501.657.800	448.577.000	89,42	53.080.800
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	439.885.000	190.461.210	43,3	249.423.790
4.02.02.1.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8.205.054.200	7.663.339.949	93,4	541.714.251
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.014.689.350	9.664.292.240	87,74	1.350.397.110
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.900.700	2.900.700	100	0
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.561.200	7.627.200	89,09	934.000
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	11.003.227.450	9.653.764.340	87,74	1.349.463.110
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	378.101.400	357.430.843	94,53	20.670.557
4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	236.864.600	231.697.000	97,82	5.167.600
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	141.236.800	125.733.843	89,02	15.502.957
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	26.808.852.490	21.696.876.215	80,93	5.111.976.275
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.578.908.746	14.577.730.510	78,46	4.001.178.236
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	263.670.400	248.881.450	94,39	14.788.950
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.790.757.344	1.434.548.951	80,11	356.208.393
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.201.436.000	3.481.566.747	82,87	719.869.253
4.02.02.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.974.080.000	1.954.148.557	98,99	19.931.443

Padang, Januari 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT

Drs. Maifrizon, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005